

Koalisi LSM Kecam Praktik Korupsi di Sumut dan Medan



Massa dari koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) saat berunjukrasa di Gedung DPRD Sumut mendesak lembaga hukum serius dalam mengungkap dan mengusut sejumlah dugaan korupsi yang melibatkan petinggi Sumut. (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 1/9 (LintasMedan) : Massa dari koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengecam keras sejumlah dugaan praktik korupsi yang semakin marak di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan.

Massa mengatasnamakan Forum Rakyat Sumatera Utara (Forsu), Lembaga Penyalur Aspirasi Rakyat (Lempar) dan Gerakan Rakyat Daerah (Garda) Sumut, menggelar aksi di Gedung DPRD Sumut dan Pemko Medan, Selasa.

Di gedung DPRD Sumut, demonstran di bawah kordinator aksi Y Husein, M Fajar Daulay dan M Affandi Ginting membeberkan sejumlah dugaan korupsi di lingkungan Pemprov Sumut dan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Massa juga mengungkap dugaan korupsi tersebut turut melibatkan Gubernur maupun Wakil gubernur Sumut.

Selain dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp1.4 Miliar, Bantuan Daerah Bawahan (BDB) senilai Rp1.8 Triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp1.9 Triliun serta dana Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2013 senilai Rp100 M yang kini dalam penanganan lembaga hukum yakni Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), demonstran juga membeberkan sejumlah dugaan korupsi yang melibatkan Wakil Gubernur Sumut.

Dugaan keterlibatan Wakil Gubernur Sumut T Erry Nuradi, menurut pengunjukrasa pada saat masih menjabat sebagai Bupati Serdang Bedagai , yakni pada dana reboisasi yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp8 Miliar dan pernah diperiksa KPK pada tahun 2010.

Dugaan korupsi rehabilitasi dan pengadaan mobileur 92 sekolah dengan kerugian negara mencapai RP2.7 Miliar, pengadaan alat peraga pendidikan SMP dan SMA tahun 2005 yang dilakukan tanpa tender senilai Rp1.1 M.

Audit BPK tentang penerbitan SPMU TA 2004 sebesar Rp.3.978.393.886 yang dibayar pada tahun 2005 tanpa dianggarkan di APBD.

Selanjutnya pengeluaran biaya iklan ucapan selamat dan peringatan hari besar pada unit kerja sekretaris daerah sebesar Rp444. 801.000, dana sisa lebih penggunaan anggaran sebesar Rp2.080.095.657 yang menyalahi surat KEpmendagri no 29 tahun 2002 dan Kepmendagri no32 tahun 1999.

Kekosongan kas daerah Kabupaten Sergai tahun anggaran 2009-2010 sebesar Rp113 yang diduga digunakan untuk biaya pemenangan dalam Pemilukada Sergai 2010 serta dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) di Disdik bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2010 senilai Rp5 M.

“Kami mendesak KPK segera melakukan pengusutan dan penahanan terhadap otak pelaku dugaan korupsi itu,” ujar Y Husein kordinator aksi.

Massa juga membeberkan dugaan korupsi lainnya di sejumlah instansi pemerintah di Sumut di antaranya, PT Perkebunan Sumut pada Kebun Sei Kari dimana penjualan karet Lumps tahun 2009 hingga 2014 dengan penghitungan kerugian perusahaan mencapai Rp2 Miliar lebih.

Kebun Tanjung Kasau dengan luas 3.250 Ha pada tahun 2980 dan pada pengukuran ulang tahun 1992 areal kebun berkurang menjadi 2.900 Ha, serta kembali diukur ulang pada 2002 kembali berkurang menjadi 2.589 Ha.

Selanjutnya sejumlah dukan korupsi dan markup di Dinas Pendidikan Sumut, serta kuat dugaan pada kegiatan pengadaan alat peraga alat bantu dan meubileur menggunakan barang rekondisi (bekas).

Kemudian dugaan korupsi Dinas Pariwisata Sumut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan Sumut.

Usai melakukan aksi di gedung DPRD Sumut, demonstran juga berunjukrasa ke Kantor Walikota Medan dan membeberkan sejumlah dugaan korupsi di institusi Pemko Medan.

Dugaan korupsi di antaranya pada Dinas Pertamanan Medan berupa anggaran perawatan lampu Stadion Teladan pada APBD 2014 senilai Rp1.5 M , renovasi kolam air mancur Adipura, APBD 2014 senilai Rp499.800.000 dll.

Dinas Pendidikan Medan, berupa dugaan korupsi rehabilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2014 untuk 73 sekolah senilai Rp73 M.

Pengolahan Pajak

Kemudian Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Medan, terkait pengolahan pajak perhotelan TA 2013 dan smester I tahun 2014

belum maksimal dan terdapat kekurangan penetapan pajak sebesar Rp1.277.581.638.05.

Pengolahan pajak restoran TA 3013 dan semester I TA 2014 belum maksimal dan terdapat kurang penetapan pajak restoran sebesar Rp 186.379.283.70.

Indikasi korupsi penerimaan pajak parkir atas pengelola sebesar Rp190.539.800 dan kekurangan penetapan pajak parkir sebesar Rp8.412.404,74, serta kekurangan pajak air tanah pada penerimaan pajak sebesar Rp693.832.820,51 sehingga terjadi kebocoran uang pendapatan daerah kota Medan mencapai miliaran rupiah. (LMC-02)

Jangan Sampai 3 Kali Gubernur Sumut Terjerat Korupsi



Massa dari Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Sumatera Utara (Alam Aksi Sumut) saat berdialog dengan anggota DPRD Sumut Ramses Simbolon yang menerima aspirasi

mahasiswa terkait dugaan korupsi Plt Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi, Rabu (19/8). (Foto: LintasMedan/irm a)

Medan, 19/8 (LintasMedan) – Massa dari Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Sumatera Utara (Alam Aksi Sumut) menilai H Tengku Erry Nuradi yang saat ini menjabat sebagai Plt Gubernur Sumut menggantikan posisi Gubernur Gatot Pujo Nugroho bukan sosok yang bersih dari tindakan korupsi.

Untuk itu mahasiswa meminta Menteri Dalam Negeri meninjau kembali Surat Menteri Dalam Negeri No 122.12/4357/SC tertanggal 10 Agustus 2015 tentang Pelaksanaan Tugas Gubernur Sumut kepada wakilnya Tengku Erry Nuradi.

“Tengku Erry juga tidak bersih. Jangan sampai tiga kali Gubernur Sumut terjerat kasus korupsi, karena ini akan menjadi beban dan memermalukan masyarakat Sumut,” kata koordinator aksi, Jalaluddin Marpaung saat puluhan massa mahasiswa itu berdelegasi ke kantor DPRD Sumut, Rabu.

Massa juga meminta Menteri Dalam Negeri untuk tidak melantik Tengku Erry Nuradi sebagai Gubernur Sumut definitif karena terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.

Massa juga membeberkan sejumlah indikasi korupsi diduga dilakukan Plt Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi pada saat menjabat Bupati dua periode di Kabupaten Serdang Bedagai.

“Kami minta DPRD Sumatera Utara mengawal kasus ini serta mensupport Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa kembali laporan keuangan Pemkab Serdang Bedagai. Kami hanya percaya KPK,” teriak massa saat berdialog dengan anggota DPRD Sumut Ramses Simbolon yang menerima aksi itu.

Ramses yang juga Politisi dari Fraksi Partai Gerindra berjanji

akan membawa aspirasi massa ke Komisi A DPRD Sumut. “Anggota Komisi A saat ini sedang melakukan kunjungan kerja ke Nias,” kata Ramses.

Anggota Komisi B ini berharap massa terus mengawal kasus tersebut serta meminta data awal dari mahasiswa, agar DPRD Sumut bisa mengirimnya ke lembaga penegak hukum. (LMC-02)

Rumah Kadis Pengairan Aceh Dilempar Granat



Ilustrasi – (Foto: LintasMedan/ist)

Banda Aceh, 19/6 (LintasMedan) – Rumah Kepala Dinas (Kadis) Pengairan Aceh Syamsul Rizal di Kompleks Pertanian, Dusun Tengku Tanah Abe, Gampong Kuta Baro, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, dilempar granat oleh orang tidak dikenal pada Jumat.

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 19.00 WIB itu tidak menyebabkan korban jiwa, tetapi kaca belakang dua mobil korban pecah akibat serpihan granat tersebut.

Syamsul yang ditemui di lokasi kejadian mengatakan, peristiwa

itu terjadi ketika ia dan anggota keluarganya hendak melaksanakan buka puasa Ramadhan.

Secara tiba-tiba, lanjut dia, terdengar suara letusan yang cukup keras.

“Lalu, kami keluar rumah dan melihat kaca belakang dua mobil saya pecah-pecah,” ujarnya.

Syamsul menjelaskan tidak tahu motif peristiwa tersebut.

Selama ini, dirinya merasa tidak pernah bermasalah dengan seseorang ataupun kelompok tertentu.

Sebelumnya pun, Syamsul tidak pernah mendapatkan ancaman apa pun.

“Peristiwa ini telah meresahkan saya dan keluarga saya. Saya harap polisi segera mengungkap peristiwa ini,” ujarnya.

Kepala Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Kombes Zulkifli mengatakan, pihaknya telah menurunkan Tim Jibom Gegana dari Satuan Brimob Kepolisian Daerah Aceh untuk melakukan sterilisasi dan mencari barang bukti.

Sejauh ini, pihaknya baru menemukan satu pen yang diduga serpihan granat.

Namun, pihaknya harus meneliti lebih lanjut guna memastikan jenis peledak yang digunakan pelaku.

“Kami belum mengetahui identitas pelaku, motif, dan jenis alat peledak yang digunakan. Kami masih melakukan pendalaman, berupa mencari barang bukti terkait peristiwa ini,” katanya.

(LMC-01/KC)

Warga Dihimbau Hindari Zona Bahaya Gunung Sinabung



Gunung Sinabung menyemburkan material vulkanis disertai awan panas, di Desa Namanteran, Karo, Sumatera Utara, Selasa (16/6). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 17/6 (LintasMedan) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali mengimbau warga agar menghindari zona berbahaya Gunung Sinabung, terutama dalam radius tujuh kilometer dari puncak gunung api di Kabupaten Karo tersebut.

“Selama beberapa hari terakhir terjadi peningkatan volume kubah lava Gunung Sinabung lebih dari tiga juta meter kubik,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, dalam siaran pers yang diterima *LintasMedan*, Rabu.

Ia menjelaskan, situasi tersebut berpotensi menimbulkan guguran kubah yang diikuti awan panas ke sisi selatan dan tenggara sejauh tujuh kilometer dari puncak kawah Gunung Api

Sinabung.

Hingga Selasa (16/6), Sinabung masih menyemburkan material vulkanis serta awan panas.

Zona bahaya itu meliputi, antara lain Desa Sukameriah, Desa Berkerah, Desa Simacem, Desa Gurukinayan, Desa Kotatonggsa, Desa Berastepu, Desa Sukanalu, Desa Gamber, dan Dusun Sibintun.

BNPB mencatat peningkatan aktivitas Gunung Sinabung membuat jumlah pengungsi bertambah menjadi hingga 10.714 jiwa.

“Aktivitas Gunung Sinabung masih berlangsung. Tidak ada yang tahu sampai kapan erupsi Gunung Sinabung berakhir,” ujarnya.
(LMC-01)

Mahasiswa Desak Pelindo Pertahankan Asset Negara



Salah satu spanduk yang dipampangkan massa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Asset Negara (AMPUN) saat berunjukrasa ke DPRD

Sumatera Utara mendesak PT Pelindo I untuk mempertahankan asset negara dari serobotan pihak tertentu. (Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 4/6 (LintasMedan) – Puluhan massa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Asset Negara (AMPUN) berunjukrasa ke DPRD Sumatera Utara mendesak PT Pelindo I untuk mempertahankan asset negara dari serobotan pihak tertentu.

Mahasiswa menyesalkan putusan PN Medan dan Kasasi Mahkamah Agung yang mengalahkan Pelindo I sebagai pemilik sah lahan 10 hektar di Pelabuhan Belawan dikenal dengan nama kawasan Pantai Anjing.

Koordinator Aksi AMPUN, Fadli Hamsi menilai, putusan PN Medan yang memenangkan oknum yang diduga memanipulasi data dan cacat dokumen kepemilikan tanah, sangat memilukan bagi tegaknya keadilan.

Apalagi pihak PN Medan terkesan menutup mata atas semua bukti/dokumen sah yang ditampilkan PT Pelindo I. Serta PN Medan terkesan punya “kepentingan” karena tidak berimbang meletakkan sita jaminan atas tanah 10 Ha tersebut tanpa memberitahukan ke PT Pelindo I.

“Asset yang dimiliki PT Pelindo sebagaimana dalam UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah aset negara. Juga UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimana pada pasal 50 disebutkan bahwa aset negara tidak dapat disita atau dieksekusi walaupun sudah bersifat inkraht,” kata Fadli Hamsi dalam orasinya.

Tidak hanya itu, massa juga menilai ada kecurangan di pihak penggugat yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang otentik dan sah. Penggugat hanya mampu menghadirkan fotokopi surat

keterangan hilang Grand Sultan No 1709 Tahun 1917 a.n Tengku Harun Al Rasyid yang dikeluarkan oleh Wakapolsek Medan Baru No Pol: SK/08/11/1990 tanggal 12 Februari 1990.

Dengan putusan PN Medan yang membatalkan HPL Pelabuhan Belawan, maka diperkirakan banyak kerugian yang dialami masyarakat Sumateta Utara.

Aksi mahasiswa ini diterima anggota Komisi B DPRD Sumut Guntur Manurung dan Novita Sari. Guntur menegaskan bahwa aset milil negara memang harus dipertahankan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pihaknya akan menyampaikan kepada pimpinan dewan untuk mengundang Pelindo I dan meminta keterangan terkait aset lahan seluas 10 hektare yang akan dieksekusi. (LMC-02)

Empat Penumpang Minibus Tewas Tabrakan di Berastagi



Ilustrasi – (Foto: LintasMedan/ist)

Berastagi, 3/6 (LintasMedan) – Empat orang penumpang minibus Espass tewas terpanggang setelah mengalami tabrakan dengan mobil boks di Jalan Medan-Kabanjahe, Rabu siang.

Informasi yang dihimpun, menyebutkan bahwa saat kejadian itu, mobil boks dengan nomor polisi BK 8891 CG melaju dari arah Medan menuju Berastagi menabrak minibus Zebra Espass BK 1826 AM yang datang dari arah yang berlawanan.

Kedua mobil hangus terbakar sehingga menewaskan empat orang di dalamnya.

Pasca kejadian itu, sopir mobil boks melarikan diri, sedangkan para korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat.

Kapolres Tanah Karo AKBP Viktor Tambunan kepada pers, mengatakan diduga sopir mobil boks hilang kendali dan saat bertabrakan.

Mobil boks terbalik dan bersentuhan dengan minibus, sehingga menimbulkan percikan api lalu terbakar.

“Sementara ini, saksi belum ada ditemukan,” tambahnya.

Kedua mobil hangus terbakar sehingga menewaskan empat orang di dalamnya.

Empat penumpang minibus yang tewas, masing-masing Rudi, Kamaria br Ginting, Masal Adema Bukit (5) dan Arika br Bukit (1).

Satu keluarga ini berasal dari Permandian, Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang.

Sementara seorang penumpang minibus lainnya dilaporkan selamat dan hingga kini korban masih dirawat di klinik.

Pihak kepolisian masih menyelidiki kecelakaan nahas ini.
(LMC-03)

Aparat Ingatkan Mahasiswa Tidak Anarkis



Anggota DPRD Sumut Ikrimah Hamidi (Fraksi PKS) dan beberapa wakil rakyat Sumut lainnya menandatangani pernyataan yang menjadi tuntutan massa mahasiswa dalam unjukrasa mengkritisi pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi-JK di Halaman Gedung DPRD Sumut, Kamis (21/5) (Foto:LintasMedan/ist)i

Medan, 21/ 5 (LintasMedan) – Aparat kepolisian memberi peringatan kepada mahasiswa yang melakukan unjukrasa mengkritisi Pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi – Jusuf Kala untuk tidak anarkis.

Peringatan itu dilakukan melalui pengeras suara dari mobil aparat yang melakukan pengawalan saat demo yang digelar di Gedung DPRD Sumut, Kamis.

Aksi yang dilakukan mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumut untuk menyampaikan rasa kecewa

terhadap kepemimpinan Jokowi-JK.

Menurut massa bangsa Indonesia saat ini banyak masalah. Dalam aksi itu mahasiswa juga melakukan teatrikal dan berorasi diluar pagar gedung dewan.

“Selama delapan bulan ini, pemerintah Jokowi-JK telah gagal membangun pondasi yang kokoh bagi keberlanjutan pembangunan yang pro kepentingan rakyat,” teriak pengunjukrasa yang dikoordinir Riki Panyalai.

Menurut pengunjukrasa, beban masyarakat kini semakin berat, dengan kenaikan harga BBM, gas dan tarif dasar listrik, bahan pokok sampai kenaikan ongkos transportasi umum. Mereka menilai rezim pemerintahan saat ini, lebih menguntungkan para pemodal asing.

Pada saat yang bersamaan tim negosiator dari Satbinmas Polresta Medan, Armansyah melalui pengeras suara meminta aksi dilakukan dengan tertib dan tidak anarkis.

“Terimakasih kepada para mahasiswa yang hadir. Silahkan sampaikan aspirasinya, kita akan bicarakan dengan anggota dewan supaya diterima,” ujar Armansyah.

Aksi itu diterima anggota DPRD Sumut Ikrimah Hamidy, Patar Sitompul dan Delmeria Sikumbang.

Aksi berlangsung tertib dan usai diterima wakil rakyat massa langsung membubarkan diri.

Menurut Armansyah dengan membangun komunikasi melalui pengeras suara, dianggap lebih efektif daripada melakukan negosiasi hanya dengan berbicara kepada para pimpinan aksi.

“Kita lihat selama ini, kalau bicara langsung dengan pimpinan aksi justru sering menimbulkan curiga. Jadi sepertinya lebih efektif pakai ini, tidak ada yang curiga dengan imbauan kita,” katanya. (LMC-02)

Pengungsi Rohingya Mohon Bantuan Pemerintah Indonesia



Anak-anak pengungsi Rohingya di Medan ikut berdelegasi memperjuangkan nasib mereka ke Gedung DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (12/5). (Foto:LintasMedan/irma)

Medan, 12/5 (LintasMedan) – Ratusan pengungsi Rohingya yang terdampar di Medan, berdelegasi ke Gedung DPRD Sumatera Utara, Selasa.

Para pencari suaka ini memohon bantuan Pemerintah Indonesia melalui lembaga legislatif di DPRD Sumut untuk turut mengambil inisiatif menyelesaikan persoalan Muslim Rohingya yang hingga kini nasibnya terkatung-katung dalam pengungsian.

Menurut Irwansyah dari Pusat Advokasi Hukum dan Hak Azasi Manusia, sedikitnya ada 300 an pengungsi Rohingya yang terpaksa mengungsi dan tinggal di beberapa titik lokasi di

Kota Medan, akibat konflik di negara mereka di Myanmar.

“Dari jumlah tersebut beberapa di antaranya adalah anak-anak,” kata Irwansyah.

Mereka tidak diakui sebagai bagian dari warga negara Myanmar, padahal Rohingya telah ada berabad-abad lamanya. Mereka diusir dari tempat kelahirannya oleh etnis mayoritas Budhis.

Menurut Irwansyah, para pengungsi tersebut ada yang sudah tinggal selama lima tahun di Medan, tanpa memiliki kepastian bagaimana nasib dan masa depan mereka kelak.

“Bantulah kami Pak, kami tidak punya siapa-siapa selain Allah,” kata Shahay Deen salah seorang pengungsi Rohingya saat lima orang perwakilan mereka di terima anggota Komisi A DPRD Sumut.

Shahay bersama rekannya Abu Ahmad mengaku telah empat tahun menjadi pengungsi bahkan mereka telah fasih berbahasa Indonesia.

Di penampungan di bawah pengawasan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dan NGO internasional bernama International Organization for Migration(IOM), mereka pun tidak boleh bebas sebagaimana layaknya warga biasa.

Mereka bahkan tidak boleh mencari nafkah atau keluar dari lokasi penampungan sesuka hati. “Semua dalam pengawasan dan kebutuhan hidup yang sangat jauh dari cukup,” ujar Abu Ahmad.

Di hadapan anggota DPRD Sumut yakni Muhammad Hafez, Burhanuddin Siregar (Fraaksi PKS) dan Anhar Monel (Fraksi Demokrat), para pengungsi Rohingya ini memaparkan kondisi menyedihkan yang pernah dialami saat harus terusir dari negara mereka.

Menurutnya, di negara itu telah terjadi pembunuhan secara massal terhadap Muslim Rohingya, rumah-rumah dibakar dan para wanita diperkosa.

Kondisi itu terpaksa membuat mereka harus menyelamatkan diri dengan perahu-perahu tua dan menyeberang kenegara-negara tetangga, seperti Bangladesh, Thailand, Malaysia, dan Indonesia.

Hingga hari inipun, menurut mereka penderitaan Rohingya belum berakhir bahkan semakin memprihatinkan dan hidup dalam kemiskinan.

Oleh karenanya para warga Rohingya ini memohon agar pemerintah Indonesia bisa ikut mengadvokasi dan mendesak negara-negara ASEAN, PBB dan Komunitas Internasional serta semua pemerintah negara-negara di dunia untuk menekan pemerintah Myanmar supaya menghentikan segala bentuk dan kekerasan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya.

Muhammad Hafez mengatakan akan membawa persoalan itu untuk di bahas di tingkat pimpinan DPRD Sumut. "Ini persoalan kemanusiaan, warga negara manapun dan agama apapun tidak boleh diperlakukan dengan cara-cara yang tidak manusiawi melanggar HAM," kata Hafez.

Selain itu, dia menegaskan Komisi A DPRD Sumut segera mengagendakan untuk mengunjungi lokasi pengungsian para warga Rohingya di Medan.

"Kita segera meninjau lokasi tempat tinggal warga Rohingya di beberapa lokasi di Medan, apakah layak atau tidak," katanya. (LMC-02)

Petugas Amankan Narkoba Jenis

Sabu di Kamar Adelia Friska



Adelia Friska, semasa hidup. (Foto: LintasMedan/Ist)

Medan, 7/5 (LintasMedan) : Aparat kepolisian menemukan dan mengamankan narkoba jenis sabu-sabu dari kamar Adelia Friska atau Adel Zinta Aulia, wanita cantik yang tewas terjun bebas dari Lt VI Hotel Grand Kanaya Medan, kemarin.

“Saat polisi melakukan penggerebekan di kamar 603 tersebut memang menemukan narkoba jenis sabu-sabu,” kata Kapolsek Medan Baru Kompol Ronni Sidabutar, Kamis.

Hingga saat ini polisi masih melakukan olah Tempat kejadian Perkara (TKP) di hotel yang berlokasi di Jalan Darussalam itu.

Namun, kata Ronni petugas masih melakukan penyelidikan terkait kematian korban yang diduga berprofesi sebagai model warga Jalan Marelان Raya Lorong Manggis, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Medan Marelان.

“Untuk sementara kita menduga wanita berusia 25 tahun ini melakukan bunuh diri, dengan terjun dari lantai VI hotel

Kanaya," katanya.

Posisi korban tewas, telungkup dengan kepala pecah dan kedua pergelangan tangan patah. Tak hanya itu, korban hanya mengenakan celana dalam berwarna biru dan tank top warna hitam. Korban tergeletak tepat di sisi kiri lobi utama hotel.

Informasi yang beredar sebelum kejadian, pihak Sat Res Narkoba melakukan penggerebekan di hotel tersebut. Dugaan sementara, wanita berparas cantik itu ketakutan dan langsung terjun bebas dari lantai 6 hotel tersebut. Polisi juga turut mengamankan tiga pria dari dalam kamar tersebut.(LMC-07)

2 Pekerja Karaoke di Pancur Batu Tewas Terpanggang



Ilustrasi – Kebakaran

Medan, 6/5 (LintasMedan) – Dua pekerja Karaoke dan Kafe Pondok Seni Joglo di Jalan Jamin Ginting, Dusun I Desa Sugau Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, tewas terpanggang di kamar mandi, akibat kebakaran yang melanda, Rabu.

Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik itu, terjadi

sekitar pukul 07.30 WIB.

Elfianus Sembiring, salah seorang warga di sekitar lokasi mengatakan warga berusaha memadamkan api yang terus membubung tinggi dengan peralatan seadanya.

Menurut dia, mobil Pengendali dan Pemadam Kebakaran (P2K) baru tiba dilokasi sekitar pukul 9.00 WIB setelah api meluluhlantakkan hampir seluruh bangunan karaoke sekaligus penginapan itu.

“Mobil pemadam tiba jam 9 pagi setelah bangunan hampir habis terbakar, itupun karena dipadamkan warga sebelumnya,” katanya.

Kepala Dusun I Desa Sugau Kecamatan Pancur Batu, Thomas Tarigan menjelaskan, proses pemadaman itu dilakukan warga setelah menghentikan dua mobil tangki air yang kebetulan melintas dari kawasan tersebut.

“Sebelum tim P2K tiba dilokasi, warga menghentikan mobil tangki yang kebetulan melintas, kemudian menyiramkan air ke sumber api,”kata dia.

Menurut dia, hampir dua jam setelah kejadian itu empat unit tim P2K dari Kabupaten Deli Serdang tiba dilokasi. “Setelah diperiksa, petugas kemudian menemukan dua korban sedang berpelukan di kamar mandi,”ujarnya.

Kedua korban itu yakni, Bobby Ginting alias Tama, 23, (Kasir) warga Binjai dan Evi, 19, (pelayan) warga Tanjung Pura.

Kedua korban diduga panik sehingga tidak tau hendak menyelamatkan diri ke arah mana.

Dia menjelaskan, saat ditemukan kedua korban saling berpelukan.

Kasubbid Penerangan Masyarakat (Penmas) Polda Sumut Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) MP Nainggolan mengatakan, saat ini pihaknya sudah meminta keterangan dari pemilik Kafe Martin

Barus, 54.

“Tim Laboratorium (Labfor) Polda Sumut sudah terjun ke lokasi kejadian untuk memastikan penyebab terjadinya kebakaran itu,”katanya.

Sementara itu jenazah kedua korban dibawa ke Rumah Sakit (RS) Adam Malik, Medan untuk keperluan visum.(LMC-07)